

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	4
I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4
I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5
I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	6
BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	6
II.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	8
II.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
III.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD	11
III.1.a. PENDAPATAN Rp0,00.....	11
III.1.b. BELANJA Rp 379.744.052,00	11
III.2. PENJELASAN POS-POS NERACA	18
III.2.a. ASET Rp 1.170.404.575,17.....	18
III.2.b. KEWAJIBAN Rp 134.962.797,00.....	23
III.2.c. EKUITAS Rp 1.035.441.778,17	25
III.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	25
III.3.a. KEGIATAN OPERASIONAL.....	25
III.3.b. KEGIATAN NON OPERASIONAL	29
III.3.c. POS LUAR BIASA Rp0,00	29
III.3.d. SURPLUS/DEFISIT LO Rp(7.498.169.315,72)	30
III.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	30
III.4.a. EKUITAS AWAL Rp1.149.016.513,89	30
III.4.b. SURPLUS/DEFISIT LO Rp(Rp 7.498.169.315,72).....	30
III.4.c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR Rp4.850.528,00.....	31
III.4.d. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN Rp7.379.744.052,00	31
III.4.e. EKUITAS AKHIR Rp1.035.441.778,17	31
BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD ...	32
IV.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	32
IV.2. SUSUNAN ORGANISASI.....	33
IV.3. SUMBER DAYA MANUSIA.....	40
BAB V. PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Belanja Langsung per program dan kegiatan tahun 2023	9
Tabel II Realisasi Anggaran Tahun 2023	13
Tabel III Belanja Operasi Tahun 2023	15
Tabel IV Belanja Pegawai Tahun 2023	16
Tabel V Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	17
Tabel VI Belanja Modal	18
Tabel VII Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin	18
Tabel VIII Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur tahun 2023	19
Tabel X Ringkasan Aset Lancar tahun 2023	19
Tabel XI Ringkasan Aset Tetap tahun 2023	20
Tabel XII Ringkasan Peralatan dan Mesin tahun 2023	20
Tabel XIII Ringkasan Gedung dan Bangunan tahun 2023	22
Tabel XIV Ringkasan Jalan Jaringan dan Irigasi	22
Tabel XV Ringkasan Aset Tetap Lainnya	23
Tabel XVI Ringkasan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023	23
Tabel XVII Ringkasan Aset Tidak Berwujud tahun 2023	24
Tabel XVIII Ringkasan Aset Lain-lain	24
Tabel XIX Ringkasan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2023	25
Tabel XX Ringkasan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2023	25
Tabel XXI Ringkasan Kewajiban	25
Tabel XXII Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023	26
Tabel XXIII Ringkasan Beban-LO	27
Tabel XXIV Ringkasan Beban Pegawai-LO	28
Tabel XXV Ringkasan selisih Beban Pegawai-LO dan LRA Tahun 2023	29
Tabel XXV Ringkasan Beban barang dan Jasa-LO	30
Tabel XXVI Ringkasan selisih Beban Pegawai-LO dan LRA Tahun 2023	29
Tabel XXVII Ringkasan selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa LRA ..	30
Tabel XXVIII Ringkasan Beban Penyusutan dan Amortisasi 2023	31
Tabel XXIX Ringkasan LPE 2023	32
Tabel XXX Ringkasan Surplus/Defisit-LO 2023	33
Tabel XXXI Ekuitas Akhir 2023	34
Tabel XXXII Komposisi Pegawai Bappelitbangda tahun 2023 berdasarkan Golongan	40
Tabel XXXIII Komposisi Pegawai Bappelitbangda tahun 2023 berdasarkan Pendidikan	40

GAMBAR

Gambar 1. Grafik perkembangan Anggaran dan Belanja Daerah13

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2015, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2015 dan seterusnya, semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
4. Neraca
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat menyediakan informasi tentang:

- a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual;
- t. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD dan Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan SKPD.

BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan masing – masing pos pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja
2. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas

3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan-LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - a. Perubahan Ekuitas

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai informasi tentang hal – hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB V PENUTUP

BAB II.
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

II.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Secara Umum, Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar **Rp. 7.823.588.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 7.379.744.052,00** atau **94,33 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp 7.723.913.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 7.286.034.052,00** atau **94,33%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sedangkan Anggaran Belanja Modal tahun 2023 adalah **Rp. 99.675.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 93.710.000,00** atau **94,02 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 15 kegiatan 39 sub kegiatan dan 4 program.

Keseluruhan Realisasi Belanja Langsung per Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Belanja Langsung Per Program dan Kegiatan tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.002.783.000,00	4.920.542.410,00	92,68
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.565.000,00	4.511.500,00	98,79
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000,00	2.469.600,00	99,18
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000,00	2.041.900,00	98,4
01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	3.986.205.000,00	3.947.170.378,00	99,37
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.770.272.000,00	3.731.965.178,00	98,98
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162.325.000,00	161.930.800,00	99,76
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	53.608.000,00	53.274.400,00	99,38
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.156.000,00	9.155.800,00	100,00
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.156.000,00	9.155.800,00	100
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.937.000,00	119.838.000,00	70,73
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.825.000,00	4.790.600,00	48,76

01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	124.112.000,00	115.047.400,00	92,7
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.278.000,00	56.640.200,00	109,85
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.818.000,00	4.808.500,00	99,8
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.472.000,00	21.437.500,00	99,84
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	996.000,00	960.000,00	96,39
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.239.000,00	3.819.200,00	61,21
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.239.000,00	12.115.000,00	98,99
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.514.000,00	13.500.000,00	93,01
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.750.000,00	71.110.000,00	92,65
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.750.000,00	71.110.000,00	92,65
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438.345.000,00	418.948.344,00	70,80
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	630.000,00	75.000,00	11,9
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.640.000,00	61.467.711,00	77,18
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.622.000,00	9.996.000,00	94,11
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.453.000,00	347.409.633,00	99,99
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	293.547.000,00	293.168.188,00	99,33
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.167.000,00	254.165.188,00	100
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.629.000,00	18.264.500,00	98,04
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.751.000,00	20.738.500,00	99,94
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	475.055.000,00	326.533.376,00	77,45
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	370.764.000,00	242.385.926,00	72,80
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	19.861.000,00	19.467.590,00	98,02
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	78.113.000,00	42.304.635,00	54,16
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	272.790.000,00	180.613.701,00	66,21
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.025.000,00	23.849.250,00	68,09

02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	35.025.000,00	23.849.250,00	68,09
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	69.266.000,00	60.298.200,00	91,46
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	15.535.000,00	15.448.600,00	99,44
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	53.731.000,00	44.849.600,00	83,47
03	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	922.880.000,00	875.228.246,00	93,53
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	377.042.000,00	361.771.232,00	93,91
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156.089.000,00	152.127.450,00	97,46
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	161.736.000,00	158.590.595,00	98,06
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.217.000,00	51.053.187,00	86,21
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	203.423.000,00	189.444.814,00	93,52
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	146.088.000,00	137.692.154,00	94,25
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	43.624.000,00	38.222.229,00	87,62
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.711.000,00	13.530.431,00	98,68
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	342.415.000,00	324.012.200,00	93,16
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.002.000,00	42.367.043,00	90,14
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	27.664.000,00	25.963.664,00	93,85
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	267.749.000,00	255.681.493,00	95,49
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.422.870.000,00	1.257.440.020,00	78,34
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.422.870.000,00	1.257.440.020,00	78,34
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.383.760.000,00	1.230.955.900,00	88,96
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	39.110.000,00	26.484.120,00	67,72

II.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang teknis dan administrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal, walaupun secara umum dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya anggaran baru yang muncul dalam APBD-P dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu pendek sehingga mengakibatkan penyelesaian tidak tepat waktu atau tidak terlaksana.
3. Pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana di Tahun 2023 dikarenakan kepadatan jadwal kegiatan di akhir tahun
4. Penyusunan 3 dokumen (RPJPD, RKPD 2024, dan RKPD perubahan 2023) dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga cukup merepotkan dalam proses penyusunannya
5. Minimnya diklat yang di adakan oleh Pemerintah Daerah Kab.Purbalingga sehingga uang setor diklat tidak bisa digunakan

BAB III.
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

III.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp.7.379.744.052.00 atau mencapai 94,33 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.7.823.588.000,00. Realisasi Belanja terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.286.034.052,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 93.710.000,00 Perkembangan realisasi belanja tahun 2022 – 2023 terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2023

	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
Belanja Pegawai	3.817.672.000	3.779.240.178	98,99	3.670.082.586	109.157.592	2,97
Belanja Barang dan Jasa	3.906.241.000	3.506.793.874	89,77	3.496.188.106	10.605.768	0,30
Belanja Modal	99.675.000	93.710.000	94,01	179.483.500	(85.773.500)	86,05
SURPLUS/DEFISIT	7.823.588.000	7.379.744.052	94,33	7.345.754.192	6.645.169.860	84,94
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	7.823.588.000	7.379.744.052	94,33	7.345.754.192	6.645.169.860	84,94

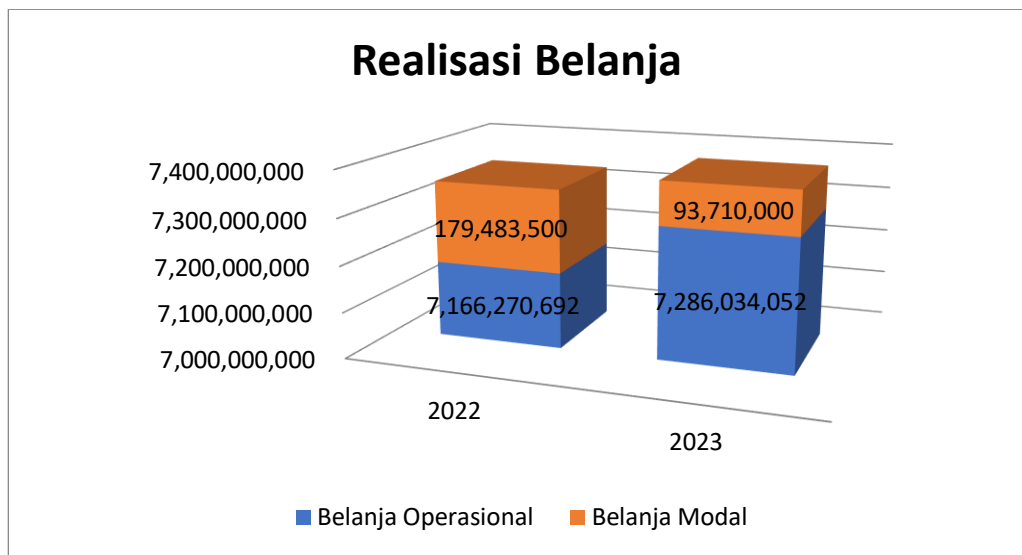
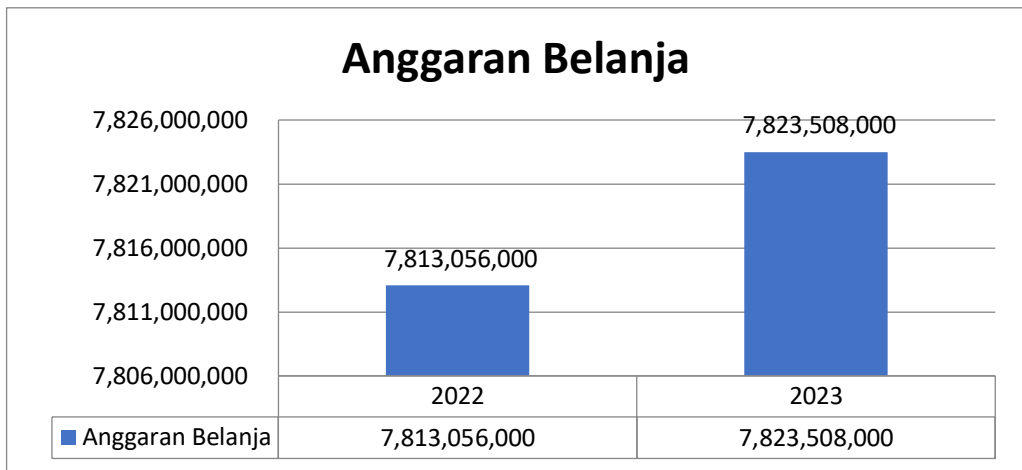
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penambahan Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 berasal dari kenaikan Belanja barang dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 119.763.360,00 Dengan adanya perubahan Regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 terdapat perbedaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat perbedaan klasifikasi rekening Barang dan Jasa.

III.1.a. PENDAPATAN _____ Rp0,00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan. Sehingga Realisasi Pendapatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 0,00.

III.1.b. BELANJA _____ Rp.379.744.052,00

Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp.7.379.744.052.00 atau mencapai 94,33 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.7.823.588.000,00. Realisasi Belanja terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.286.034.052,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 93.710.000,00 Perkembangan realisasi belanja tahun 2022 – 2023 terlihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 1.1 Grafik perkembangan Anggaran dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 – 2023

III.1.b.1). Belanja Operasi _____ Rp 7.286.034.052,00

Realisasi Belanja Operasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar Rp. 7.286.034.052,00 atau 94,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.723.913.000,00. Realisasi Belanja Operasi tersebut merupakan 98,73% dari total realisasi Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Rincian belanja operasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III. Ringkasan Belanja Operasi Tahun 2023

	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
Belanja	7,823,588,000.00	7,379,744,052.00	94.33	7,345,754,192.00	33.989.860	4,63
Belanja Operasi	7,723,913,000.00	7,286,034,052.00	94.33	7,166,270,692.00	119.763.360	2,75
Belanja Pegawai	3,817,672,000.00	3,779,240,178.00	98.99	3,670,082,586.00	109.157.592	2,97
Belanja Barang dan Jasa	3,906,241,000.00	3,506,793,874.00	89.77	3,496,188,106.00	10.605.768	0,30
Belanja Modal	99,675,000.00	93,710,000.00	94.02	179,483,500.00	(85.773.500)	47,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,675,000.00	93,710,000.00	94.02	103,337,500.00	(9.627.500)	9,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00		76,146,000.00	(76.146.000)	(100)
SURPLUS/DE FISIT	(7,823,588,000.00)	(7,379,744,052.00)	94.33	(7,345,754,192.00)	33.989.860	4,63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(7,823,588,000.00)	(7,379,744,052.00)	94.33	(7,345,754,192.00)	33.989.860	4,63

III.1.b.1).a) Belanja Pegawai _____ Rp3.779.240.178,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar Rp. 3.799.240.178,00 dari anggaran yang ditetapkan atau sebesar 98,99 %. Realisasi belanja pegawai ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya penambahan anggaran pada rekening tunjangan fungsional dan penambahan 1 ASN di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

Rincian Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1V. Ringkasan Belanja Pegawai Tahun 2023

	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
Gaji & Tunjangan	2,103,784,000.00	2,075,384,428.00	98,65	2.060.534.957	14,849,471.00	0,70
Gaji Pokok PNS	1.437.932.000,00	1.425.156.860,00	99,11	1,411,296,980.00	13,859,880.00	0,97
T Keluarga	173.704.000,00	172.031.993,00	99,04	170.007.556,00	2,024,437.00	1,16
T Jabatan	203.804.000,00	202.790.000,00	99,50	212.650.000,00	(9,860,000.00)	(4,83)
T Fung PNS	10.865.000,00	11.025.000,00	101,47	6.634.850,00	4,390,150.00	4,04
T Fungsional Umum PNS	16.221.000,00	15.765.000,00	97,19	15.215.000,00	550,000.00	3,40
T Beras	97.165.000,00	96.173.760,00	98,98	95.884.080,00	289,680.00	0,30
T PPh/ Khusus	21.329.000,00	21.291.977,00	99,83	10.314.998,00	10,976,979.00	51,46
Pemb Gaji	20.000,00	19.581,00	97,90	19.734,00	(153.00)	0,76
I. Jaminan Kesehatan	122.877.000,00	119.435.190,00	97,20	114.811.970,00	4,623,220.00	37,62
Iuran JKK	2.952.000,00	2.923.765,00	98,09	2.912.375,00	11,390.00	3,85
Iuran JKM	8.856.000,00	8.771.302,00	99,04	8.737.168,00	34,134.00	3,85
Iuran simpanan Peserta tabungan perumahan rakyat	8.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.666.488.000,00	1.656.580.750,00	99,40	1.532.397.875	124,182,875.00	7,45
Berdasarkan Beban Kerja ASN	1,666,488,000.00	1,656,580,750.00	99,40	1,532,397,875	124,182,875.00	7,45
Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	0	0	0	0	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	47,400,000.00	47,275,000.00	99,74	89,200.000	(41,925,000.00)	(88,44)
Belanja honorarium	45,900,000.00	45,775,000.00	99,73	83.800.000	(38,025,000.00)	(82,84)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1,500,000.00	1,500,000.00	100	5.400.000	(3,900,000.00)	(2,6)
Jumlah	3,817,672,000.00	3,779,240,178.00	98,99	3.670.082.586	109,157,592.00	(2,86)

III.1.b.1).b) Belanja Barang dan Jasa _____ Rp3.506.793.874,00

Realisasi Belanja Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar Rp. **3.506.793.874,00** atau **89,77%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 3.906.241.000,00**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan **47,52%** dari total realisasi Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Realisasi Belanja Barang dan Jasa ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023 disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada rekening Jasa Konsultasi Non Konstruksi.

Tabel V Ringkasan Belanja Barang dan Jasa tahun 2023

	2023			2022		Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%	
Belanja Barang Pakai Habis	640.605.000,00	563.902.299,00	88,03	791.638.850	(227.736.551)	(35,55)	
Belanja Jasa Kantor	1.459.516.000,00	1.209.117.711,00	82,84	1.338.411.765	(129.294.054)	(8,85)	
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.980.000,00	15.936.633,00	99,73	6.528.989	9.407.644	58,87	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.622.000,00	20.996.000,00	97,10	9.000.000	11.996.000	55,48	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.248.000,00	9.200.000,00	99,48	30.000.000	(20.800.000)	(224,91)	
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	19.092.000,00	54,54	2.500.000	16.592.000	47,40	
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	809.490.000,00	795.938.380,00	98,33	195.646.000	600.292.380	74,16	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	0,00	0	0	0	0	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.905.000,00	95.839.289,00	99,93	109.237.551	(13.398.262)	(13,97)	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.751.000,00	20.738.500,00	99,40	57.764.000	(37.025.500)	(178,43)	
Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	1.289.000,00	989.000,00	76,73	1.500.000	(511.000)	(39,64)	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	776.335.000,00	739.544.062,00	95,26	938.460.951	(198.916.889)	(25,62)	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.500.000,00	15.500.000,00	100	15.500.000	0	0	
Jumlah	3.906.241.000,00	3.506.793.874,00	89,77	3.496.188.106	10.605.768	0,27	

III.1.b.2). BELANJA MODAL _____ Rp93.710.000,00

Realisasi Belanja Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar **Rp. 93.710.000,00** atau **94,02%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 99.675.000,00**. Realisasi Belanja Modal tersebut sebesar 1,27% dari total Realisasi Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Realisasi Belanja Modal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran pada rekening Alat kantor dan Rumah Tangga dan Bangunan Gedung.

Rincian Belanja Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel VI. Ringkasan Belanja Modal Tahun 2023

	2023			2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	32.395.000	(23.395.000)	194,96
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000,00	600.000,00	100	0	600.000,00	100
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.250.000,00	7.200.000,00	99,31	1.350.000	5.850.000	80,69
Belanja Modal Komputer	79.325.000,00	76.410.000,00	96,33	69.592.500	6.817.500	8,60
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,00	500.000,00	100	0	0	0
Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0	0	76.146.000	(76.146.000)	0
Jumlah	99.675.000,00	93.710.000,00	94,02	179.483.500	(85.773.500)	(86,05)

III.1.b.2).a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp_____ 93.710.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 9.000.0000** atau **94,02%** dari anggaran sebesar **Rp. 99.675.000,00**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian belanja modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel VI Ringkasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.675.000	103.337.500
5.2.2.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	600,000.00	600.000,00
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,000,000.00	9.000.000,00
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6,000,000.00	6.000.000,00
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	12,500,000.00	1.200.000,00
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	500,000.00	500.000,00

5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	54,325,000.00	53.250.000,00
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25,000,000.00	23.160.000,00

III.1.b.2).b) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur _____ **Rp600.000,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 600.000** atau **100%** dari anggaran sebesar **Rp. 600.000**. Pada Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur ini mengalami kenaikan karena pada tahun sebelumnya tidak ada anggaran untuk belanja Modal tersebut. Rincian belanja modal belanja modal Alat Bengkel dan Alat Ukur adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Ringkasan Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000,00	600,000.00
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	600,000.00	600,000.00

III.1.b.2).c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan _____ **Rp0,00**

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp 0** karena pada tahun 2023 tidak dianggarkan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung.

III.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset/harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu.

III.2.a. ASET _____ **Rp.1.170.404.575,17**

Posisi Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 adalah **Rp. 1.170.404.575,17** atau mengalami penurunan sebesar **9,33 %** dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar **Rp. 1.290.865.170,89**. Nilai Aset tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini :

Table VII. Ringkasan Aset tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Lancar	4.054.900,00	14.134.500,00	(10.079.600,00)	(71,31)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	1.165.769.675,17	1.276.730.670,89	(110.960.995,72)	(8,69)
Aset Lainnya	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
Jumlah Aset	1.170.404.575,17	1.290.865.170,89	(120.460.595,72)	(9,33)

III.2.a.1). ASET LANCAR _____ **Rp.4.054.900,00**

Nilai Aset Lancar pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 4.054.900,00** atau mengalami kenaikan **52,89 %** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 14.134.500,00**. Kondisi aset lancar pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel VIII. Ringkasan Aset Lancar tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Persediaan	4.054.900,00	14.134.500,00	(10.079.600,00)	(71,31)
Jumlah Aset Lancar	4.054.900,00	14.134.500,00	(10.079.600,00)	(71,31)

Aset Lancar pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 berupa Persediaan yang terdiri dari barang *stock opname*. Rincian persediaan adalah sebagai berikut :

- a) Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 530.300,00
- b) Kertas dan Cover sebesar Rp. 1.077.600,00
- c) Benda Pos sebesar Rp 300.000,00
- d) Bahan Komputer sebesar Rp. 2.099.800,00
- e) Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp.47.200,00

III.2.a.2). ASET TETAP Rp.1.165.769.675,17

Nilai Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.1.165.769.675,17** atau mengalami penurunan sebesar **2,91 %** dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar **Rp.1.276.730.670,89**. Kondisi aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Table IX. Ringkasan Aset Tetap tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Peralatan dan Mesin	3.021.592.000,00	3.039.183.000,00	(17.591.000,00)	(0,58)
Gedung dan Bangunan	1.473.620.000,00	1.473.620.000,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.146.000,00	49.146.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.378.888.324,83)	(3.285.518.329,11)	(93.369.995,72)	2,84
Jumlah Aset Tetap	1.165.769.675,17	1.276.730.670,89	(110.960.995,72)	(8,69)

Jumlah Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 terjadi penurunan karena adanya :

- Penambahan dari Belanja Modal Rp.93.710.000,00
- Pengurangan aset karena reklasifikasi ke aset lainnya - aset lain-lain sebesar Rp. 111.310.000
- Bertambahnya Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. (3.378.888.324,83)

Secara rinci, penjelasan atas mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2023 adalah sebagai berikut:

III.2.a.2).a) Peralatan dan Mesin _____ Rp.3.021.592.000,00

Saldo Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 3.021.592.000,00** atau mengalami penurunan sebesar **0,58 %** dari saldo tahun sebelumnya sebesar **Rp 3.039.183.000,00** sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel X. Ringkasan Peralatan dan Mesin tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Peralatan dan Mesin	3.021.592.000	3.039.183.000	(17.591.000)	(0,58)
Jumlah Peralatan dan Mesin	3.021.592.000	3.039.183.000	(17.591.000)	(0,58)

Berdasarkan tabel diatas, saldo peralatan dan mesin yang mengalami penurunan tersebut di karenakan :

- Penambahan Belanja Modal Rp. 93.710.000,00 yang berupa:
 - Pembelian 1 (satu) unit Tensimeter Digital senilai Rp. 600.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Alat Cek Gula Darah senilai Rp. 200.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Timbangan Digital senilai Rp. 300.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Proyektor senilai Rp. 1.200.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Standar Mic senilai Rp. 9.000.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Kamera senilai Rp. 6.000.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Laptop senilai Rp.16.000.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Personal Computer senilai Rp.9.750.000,00
 - Pembelian 2 (dua) unit Laptop senilai Rp.27.500.000,00
 - Pembelian 5 (lima) unit Printer senilai Rp.16.560.000,00
 - Pembelian 1 (satu) unit Printer senilai Rp.6.600.000,00
- Pengurangan aset karena reklasifikasi ke aset lainnya - aset lain-lain sebesar Rp. 109.601.000,00 yang berupa :
 - Filing Cabinet Besi 1 (satu) unit senilai Rp. 500.000,00
 - Karpet 1 (satu) unit senilai Rp.2.240.000,00
 - Kursi Rapat 1 (satu) unit senilai Rp. 1.250.000,00
 - A.C. Split 1 (satu) unit senilai Rp. 4.000.000,00
 - AC Unit 1 (satu) unit senilai Rp.4.800.000,00
 - AC Unit 1 (satu) unit senilai Rp.5.200.000,00
 - Handy Cam 1 (satu) unit senilai Rp.5.000.000,00
 - Korden 1 (satu) unit senilai Rp.3.850.000,00
 - Korden 1 (satu) unit senilai Rp.4.446.000,00
 - Lampu LED 1 (satu) unit senilai Rp.2.900.000,00
 - Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv 1 (satu) unit senilai Rp.600.000,00
 - Proyektor + Attachment 1 (satu) unit senilai 9.200.000,00
 - Garmin GPS 1 (satu) unit senilai Rp.9.000.000,00
 - P.C Unit 1 (satu) unit senilai Rp.5.200.000,00
 - P.C Unit 1 (satu) unit senilai Rp.4.950.000,00
 - P.C Unit 1 (satu) unit senilai Rp.4.000.000,00
 - P.C Unit 1 (satu) unit senilai Rp.4.950.000,00
 - Note Book 1 (satu) unit senilai Rp.8.000.000,00
 - Note Book 1 (satu) unit senilai Rp.7.790.000,00
 - CPU 2 (dua) unit senilai Rp.9.990.000,00
 - Hard Disk 1 (satu) unit senilai Rp.931.000,00
 - Hard Disk 1 (satu) unit senilai Rp.1.250.000,00

- Printer 1 (satu) unit senilai Rp.750.000,00
- Printer 1 (satu) unit senilai Rp.950.000,00
- Printer 1 (satu) unit senilai Rp.1.200.000,00
- Printer 1 (satu) unit senilai Rp.3.450.000,00
- Monitor 1 (satu) unit senilai Rp.1.000.000,00
- Printer 1 (satu) unit senilai Rp.975.000,00
- Printer 1 (satu) unit senilai Rp.1.229.000,00
- Pengurangan aset yang berasal dari belanja modal masuk dalam barang ekstrakomptable sebesar Rp.1.700.000,00 yang berupa :
 - Standar Mic 5 (lima) unit senilai Rp.1.200.000,00
 - Alat Cek Gula Darah 1 (satu) unit senilai Rp.200.000,00
 - Timbangan Digital 1 (satu) unit senilai Rp.300.000,00

III.2.a.2).b) Gedung dan Bangunan _____ Rp.1.473.620.000,00

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.473.620.000,00** tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang atau sama dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.1.473.620.000,00** sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel XI Ringkasan Gedung dan Bangunan tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Gedung & Bangunan	1.473.620.000,00	1.473.620.000,00	-	-
Jumlah	1.473.620.000,00	1.473.620.000,00	-	-

III.2.a.2).c) Jalan, Jaringan, dan Irigasi _____ Rp.49.146.000,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 49.146.000,00 tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang atau sama dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 49.146.000,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Table XII. Ringkasan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Instalasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
Jaringan	14.146.000,00	14.146.000,00	-	-
Jumlah Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.146.000,00	49.146.000,00		

III.2.a.2).d) Aset Tetap Lainnya _____ Rp.300.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.300.000,- tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang atau sama dengan posisi 31 Desember 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel XIII. Ringkasan Aset Tetap Lainnya tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Barang bercorak kesenian	300.000,00	300.000,00	-	-
Hewan/ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya	300.000,00	300.000,00		

III.2.a.2).e) Akumulasi Penyusutan _____ Rp.(3.378.888.324,83)

Saldo akumulasi Penyusutan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 3.378.888.324,83) bertambah sebesar 2,84% atau (Rp 93.369.995,72) dari saldo akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar (Rp3.285.518.329,11). Rincian akumulasi penyusutan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>
Akumulasi Penyusutan Awal	3.285.518.329,11
(+) Koreksi Akumulasi Penyusutan Awal	0
Akumulasi Penyusutan Awal setelah koreksi	<u>3.285.518.329,11</u>
Penyusutan Tahun Berjalan :	
(+) Reklas Masuk	0
(-) Reklas Keluar	109.021.000,00
(+) Beban Penyusutan Tahun 2022	<u>202.390.995,72</u>
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	<u>3.378.888.324,83</u>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel XIV. Ringkasan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023

No.	Keterangan	Akumulasi Penyusutan
1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu	194.700.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.481.139.562,50
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	119.862.500,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	409.032.500,00
5	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.160.000,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	47.986.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	26.729.300,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	1.110.000,00
9	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	304.010.937,50
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	122.376.625,00
11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	588.446.989,83

12	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas	4.568.760,00
12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	14.875.000,00
13	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	3.890.150,00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN		3.378.888.324,83

III.2.a.3). ASET LAINNYA _____ Rp.580.000,00

Saldo Aset Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.580.000,00.

III.2.a.3.a) Aset Tidak Berwujud _____ Rp.50.565.000,00

Saldo aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 50.565.000,00 nilainya masih sama dengan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 50.565.000,00 berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jalan dengan rincian sebagai berikut :

Table XV. Ringkasan Aset Tidak Berwujud tahun 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Sistem Informasi Manajemen Jalan	50.565.000,00	50.565.000,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Berwujud	50.565.000,00	50.565.000,00	0,00	0,00

III.2.a.3.b) Aset Lain-lain _____ Rp.178.101.000,00

Saldo Aset lain-lain pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.178.101.000,00 ,nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.68.500.000,00 disebabkan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain – lain sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XVI. Ringkasan Aset Lain-lain tahun 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Lain-lain	178.101.000,00	68.500.000,00	109.601.000,00	160,00
Jumlah Aset Lain-lain	178.101.000,00	68.500.000,00	109.601.000,00	160,00

III.2.a.3.c) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud _____ Rp.(50.565.000)

Saldo akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.50.565.000,00) nilainya masih sama dengan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar (Rp.50.565.000,00) sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel XVII. Ringkasan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Ak. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(50.565.000,00)	(50.565.000,00)	0,00	0,00
Jumlah Aset Berwujud	(50.565.000,00)	(50.565.000,00)	0,00	0,00

III.2.a.3).d) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya _____ Rp.(177.521.000)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.177.521.000,00) ,nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp.68.500.000,00) disebabkan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain – lain dan penghapusan pencatatan nilai buku pada aset lain – lain sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Table XVIII. Ringkasan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Lain-lain	(177.521.000,00)	(68.500.000,00)	(109.021.000,00)	159,15
Jumlah Aset Lain-lain	(177.521.000,00)	(68.500.000,00)	(109.021.000,00)	159,15

III.2.b. KEWAJIBAN _____ Rp.134.962.797,00

Saldo Kewajiban pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 134.962.797,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.6.885.860,00** atau sebesar 4,85 % dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 141.848.657,00** sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Table XIX. Ringkasan Kewajiban tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Utang Belanja	134.962.797,00	141.848.657,00	(6.885.860,00)	(4,85)
Jumlah Kewajiban	134.962.797,00	141.848.657,00	(6.885.860,00)	(4,85)

III.2.b.1).a) Utang Belanja _____ Rp. 134.962.797,00

Saldo Utang Belanja tahun 2023 adalah Utang Belanja Pegawai yang merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa pembayaran gaji maupun tunjangan, dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta utang belanja barang/jasa yang sampai dengan akhir tahun 2023 belum terbayarkan.

Saldo Utang Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 adalah

sebesar **Rp.134.962.797,00** merupakan utang belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang terdiri dari :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS bulan Desember 2023 yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.125.254.675,00
- b) Utang Belanja Tunjangan Tunjangan Kekurangan bulan Februari s/d Desember 2023 sebesar Rp.3.097.700,00
- c) Utang Belanja Tagihan Listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp. 5.708.524,00
- d) Utang Belanja Tagihan Internet bulan Desember 2023 sebesar Rp.621.600,00
- e) Utang Belanja Tagihan Telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp. 107.488,00
- f) Utang Belanja Tagihan Air bulan Desember 2023 sebesar Rp. 172.810,00

III.2.c. EKUITAS **Rp.1.035.441.778,17**

Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban.

III.2.c.1). EKUITAS **Rp.1.035.441.778,17**

Saldo Ekuitas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.035.441.778,17** mengalami penurunan sebesar **Rp. 113.574.735,72** atau sebesar **9,88%** dari saldo ekuitas tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Periode s/d 31 Desember 2023

Table XX. ringkasan laporan perubahan ekuitas tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Ekuitas Awal	1.149.016.513,89	1.243.849.013	(94.832.498,61)	(7,62)
SURPLUS / DEFISIT - LO	(7.498.169.315,72)	(7.441.814.140,61)	(56.355.175,11)	0,76
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKA/ KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas	4.850.528	1.227.450	3.623.078,00	295,17
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.379.744.052	7.345.754.192	33.989.860,00	0,46
EKUITAS AKHIR	1.035.441.778,17	1.149.016.513,89	(113.574.735,72)	(9,88)

III.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

III.3.a. KEGIATAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrual. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO dan beban.

III.3.a.1). PENDAPATAN-LO **Rp0,00**

Pendapatan - LO pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak mengelola Pendapatan

III.3.a.2). BEBAN **Rp 7.498.169.315,72**

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar **Rp 7.498.169.315,72** yang terdiri dari :

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp 3.775.855.097,00
- 2) Beban Persediaan sebesar Rp 571.041.899,00
- 3) Beban Jasa sebesar Rp. 2.088.830.473,00
- 4) Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 117.566.789,00
- 5) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 739.544.062,00
- 6) Beban Hibah Rp 2.940.000,00
- 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 202.390.995,72

Adapun Nilai beban LO tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini :

Table XXI. ringkasan Beban-LO

	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	LO (Rp)	LO (Rp)		
Beban Pegawai	3.775.855.097	3.724.290.120	51.564.977,00	1,38
Beban Persediaan	571.041.899	765.253.950	(194.212.051,00)	(25,38)
Beban Jasa	2.088.830.473	1.602.847.427	485.983.046,00	30,32
Beban Pemeliharaan	117.566.789	142.317.551	(24.750.762,00)	(17,39)
Beban Perjalanan Dinas	739.544.062	938.460.951	(198.916.889,00)	(21,20)
Beban Hibah	2.940.000	2.520.000	420.000,00	16,67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	202.390.995,72	262.949.141,61	(60.558.145,89)	(23,03)
SURPLUS/DEFISIT Dari Operasi	(7.498.169.315,72)	(7.438.639.140,61)	(59.530.175,11)	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	3.175.000	(3.175.000)	-100
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(3.175.000)	3.175.000	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.498.169.315,72)	(7.441.814.140,61)	(56.355.175,11)	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.498.169.315,72)	(7.441.814.140,61)	(56.355.175,11)	0

III.3.a.2).a) Beban Pegawai **Rp 3.775.855.097,00**

Beban Pegawai Rincian Beban Pegawai - LO pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. XXII. Beban Pegawai-LO tahun 2023

	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	3.775.855.097	3.724.290.120	51.564.977	1,38
Jumlah	3.775.855.097	3.724.290.120	51.564.977	1,38

Beban pegawai – LO di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 51.564.977** atau sebesar **1,38%** dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan 1 ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sehingga menambah anggaran sesuai dengan kebutuhan tersebut. Perbedaan Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai LRA di tahun 2023 adalah sebagai berikut

Table. XXIII. Ringkasan selisih Beban Pegawai-LO dan LRA Tahun 2023

	LO	LRA	Selisih
Gaji Pokok ASN	1,423,657,400.00	1.425.156.860,00	(1.499.460)
Tunjangan keluarga ASN	171,822,310.00	172.031.993,00	-209.683
Tunjangan Jabatan ASN	202.790.000	202.790.000,00	0
Tunjangan Fungsional ASN	14.025.000	11.025.000,00	3.000.000
Tunjangan Fungsional Umum ASN	15,765,000.00	15.765.000,00	0
Tunjangan Beras ASN	96,173,760.00	96.173.760,00	0
Tunjangan Pph/Tunjangan khusus ASN	21,266,687.00	21.291.977,00	-25.29
Pembulatan Gaji ASN	20,081.00	19.581,00	18.123
Iuran Jaminan Kesehatan ASN	119,464,013.00	119.435.190,00	28.823
Iuran Jaminan Kecelakaan kerja	2,920,165.00	2.923.765,00	-3.6
Iuran Jaminan Kematian ASN	8,760,506.00	8.771.302,00	-10.796
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN	1,651,915,175.00	1.656.580.750,00	(4.665.575)
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	43,375,000.00	43.375.000,00	0
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,400,000.00	2.400.000,00	0

Selisih Beban pegawai – LO dengan Belanja pegawai LRA di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp. 3.385.081,00** dikarenakan terdapat utang Belanja Pegawai di Tahun 2022 yang dibayarkan di Tahun 2023 sebesar **Rp. 131.737.454,00** sehingga mengurangi Beban Pegawai Tahun 2023. serta adanya utang belanja pegawai Tahun 2023 sebesar **Rp. 128.352.375,00** sehingga menambah beban pegawai di tahun 2023 sebesar **Rp. 128.352.375,00**.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Belanja pegawai - LRA		Rp. 3.779.240.178
- Utang belanja pegawai tahun 2022 yang dibayarkan di Tahun 2023	(Rp. 131.737.454)	
- Utang Belanja pegawai tahun 2023	Rp. 128.352.375	
		<u>Rp. (3.385.081)</u>
Beban Pegawai – LO		Rp. 3.775.855.097

III.3.a.2).b) Beban Barang dan Jasa _____ Rp 68.103.344,00

Beban Barang dan Jasa – LO di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 68.103.344,00** atau sebesar **1,97 %** dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penambahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga serta adanya kenaikan penyerapan dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel XXIV. Ringkasan Beban Barang dan Jasa -LO 2023

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa	3.516.983.223	3.448.879.879	68.103.344	1,97
Jumlah	3.516.983.223	3.448.879.879	68.103.344	1,97

Perbedaan Beban Barang dan Jasa – LO dengan Belanja Barang dan Jasa LRA di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel XXV. Beban Barang Jasa –LO dengan Belanja Barang dan Jasa LRA

	LO	LRA	Selisih
Barang Pakai Habis	385,860,500.00	563,902,299.00	(178,041,799.00)
Jasa Kantor	1,210,467,460.00	1,209,117,711.00	1,349,749.00
Iuran Jaminan /Asuransi	1,596,327,960.00	15,936,633.00	1,580,391,327.00
Sewa Peralatan dan Mesin	20,996,000.00	20,996,000.00	-
Sewa Gedung dan Bangunan	9,200,000.00	9,200,000.00	-
Sewa aset tetap lainnya	19,092,000.00	19,092,000.00	-
Jasa Konsultansi Non Konstruksi	795,938,380.00	795,938,380.00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95,839,289.00	95,839,289.00	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,738,500.00	20,738,500.00	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	989,000.00	989,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	739,544,062.00	739,544,062.00	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15,500,000.00	15,500,000.00	-
Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	1,700,000.00	-	1,700,000.00
Jumlah	3.516.983.223	3,506,793,874.00	10.189.349

Perbedaan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar **Rp. 14.134.500**. Adapun Perhitungan Beban Barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa LRA		Rp. 3.506.793.874,00
- Persediaan Tahun 2022	(Rp. 14.134.500)	
- Persediaan Tahun 2023	Rp.4.054.900	
		<u>Rp (10.189.349)</u>
Beban Barang dan Jasa – LO		Rp. 3.516.983.223

III.3.a.2).c) Beban Persediaan _____ Rp571.041.899,00

Beban persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 571.041.899,00. Beban persediaan ini mengalami penurunan sebesar **Rp (194.212.051) atau (25,38)%** dari tahun sebelumnya.

III.3.a.2).d) Beban Jasa _____ Rp 2.088.830.473,00

Beban jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp **2.088.830.473,00**. Beban jasa ini mengalami kenaikan sebesar **Rp 485.983.046,00 atau (30,32)%** dari tahun sebelumnya

III.3.a.2).e) Beban Pemeliharaan _____ Rp 142.317.551,00

Beban Pemeliharaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp **142.317.551,00**. Beban Pemeliharaan ini mengalami penurunan sebesar **Rp (24.750.762,00) atau (17,39)%** dari tahun sebelumnya.

III.3.a.2).f) Beban Perjalanan Dinas _____ Rp 739.544.062,00

Beban Perjalanan Dinas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp **739.544.062,00**. Beban Perjalanan Dinas ini mengalami penurunan sebesar **Rp (198.916.889,00) atau (21,20)%** dari tahun sebelumnya.

III.3.a.2).g) Beban Hibah _____ Rp2.940.000,00

Beban Hibah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp **2.940.000,00**. Beban Hibah ini mengalami kenaikan sebesar **Rp 420.000,00 atau 16,67%** dari tahun sebelumnya. Beban Hibah di tahun 2023 merupakan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang berupa Piala dan Piagam untuk pemenang lomba stand terbaik dan krenova tahun 2023.

III.3.a.2).h) Beban Penyusutan dan Amortisasi _____ Rp202.390.995,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi di Tahun 2023 sebesar Rp **202.390.995,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. (60.558.145,89) atau sebesar 23,03 %** dari tahun sebelumnya. Nilai beban penyusutan tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel XXVI. Ringkasan LPE tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
8.1.8.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	61.029.687,50
8.1.8.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.337.000,00
8.1.8.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.075.000,00
8.1.8.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	300.000,00
8.1.8.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	740.000,00
8.1.8.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.057.000,00
8.1.8.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.740.000,00

8.1.8.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.100.000,00
8.1.8.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.680.000,00
8.1.8.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	870.000,00
8.1.8.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	379.800,00
8.1.8.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	360.000,00
8.1.8.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	41.049.375,00
8.1.8.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	375.000,00
8.1.8.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.085.250,00
8.1.8.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	625.000,00
8.1.8.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.685.393,22
8.1.8.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	800.000,00
8.1.8.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.828.000,00
8.1.8.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	3.045.840,00
8.1.8.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	875.000,00
8.1.8.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	353.650,00
	Jumlah	202.390.995,72

III.3.b. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Kegiatan Non Operasional mengalami penurunan sebesar Rp 0 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

III.3.c. POS LUAR BIASA Rp0,00

Pada tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak ada Kegiatan Pos Luar Biasa.

III.3.d. SURPLUS/DEFISIT LO Rp(7.498.169.315,72)

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (7.498.169.315,72).

III.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Ekuitas pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.035.441.778,17** mengalami penurunan sebesar **98,84 %** dari saldo ekuitas tahun 2022.

III.4.a. EKUITAS AWAL Rp1.149.016.513,89

Ekuitas Awal Tahun 2023 **Rp. 1.149.016.513,89** berasal dari Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2022. Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan sebagai berikut

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode s/d 31 Desember 2023

Tabel XXVII. Ringkasan LPE tahun 2023

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Ekuitas Awal	1.149.016.513,89	1.243.849.012,50	(94.832.498,61)	(7,62)
SURPLUS/ DEFISIT - LO	(7.498.169.315,72)	(7.441.814.140,61)	56.335.175,1	7,57
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKA/ KESALAHAN MENDASAR				
Koreksi Ekuitas	4.850.528,00	1.227.450,00	3.623.078	2,95
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.379.744.052,00	7.345.754.192,00	33.989.860	4,63
EKUITAS AKHIR	1.035.441.778,17	1.149.016.513,89	(113.574.736)	(98,84)

III.4.b. SURPLUS/DEFISIT LO _____ Rp. (Rp 7.498.169.315,72)

Saldo Surplus/Defisit-LO pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar **(Rp 7.498.169.315,72)** yang berasal dari total Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp 0,00 dikurangi dengan nilai Beban tahun 2023 sebesar **Rp 7.498.169.315,72**.

Saldo Surplus/Defisit-LO tahun 2023 mengalami penambahan sebesar **Rp 56.335.175,111 atau 0,75 %** dibandingkan saldo Surplus/Defisit-LO tahun 2022, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel XXVIII. Ringkasan Surplus/Defisit LO tahun 2023

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
	LO	LO	Rp.	%
	(Rp.)	(Rp.)		
Pendapatan-LO	0	0	0	0
Beban	7.498.169.315,72	7.438.639.140,61	59.476.175,11	0,80
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0	(3.175.000)	(3.175.000)	-100
Surplus/ Defisit-LO	(7.498.169.315,72)	(7.441.814.140,61)	(56.335.175,11)	0,75

III.4.c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR _____ Rp 4.850.528,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berupa Koreksi Ekuitas Lainnya. Pada tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar **Rp. 4.850.528,00** Nilai tersebut berasal dari pengurangan aset tetap serta penambahan aset lain lainnya di Tahun 2023.

III.4.c.1). Koreksi Ekuitas Karena Mutasi Aset Tetap _____ Rp 1.160.000,00

Koreksi ekuitas karena mutasi aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 1.160.000,00 yang diperoleh dari pengurangan aset tetap karena reklas ke aset lainnya dan penambahan aset lainnya yang berasal dari aset tetap tahun 2023.

III.4.c.2). Koreksi Ekuitas Karena Kewajiban Jangka Pendek _____ Rp 4.850.532,00

Koreksi ekuitas karena kewajiban jangka pendek pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023

sebesar Rp 4.850.532,00 yang berasal dari pencatatan utang belanja pegawai berupa tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja PNS dan iuran jaminan Kesehatan PNS yang terdapat selisih antara pencairan dengan pencatatan pada jurnal ditahun sebelumnya.

III.4.d. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN _____ Rp7.379.744.052,00

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 adalah Defisit Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp 7.379.744.052,00** yang harus dikonsolidasikan dengan PPKD.

III.4.e. EKUITAS AKHIR _____ Rp1.035.441.778,17

Ekuitas Akhir pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp 1.035.441.778,17 berasal dari perhitungan :

Tabel XXIX. Ekuitas Akhir tahun 2023

Ekuitas Awal Tahun 2023	1.149.016.513,89
Surplus/Defisit-LO	(7.498.169.315,72)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
Koreksi Ekuitas	4,850,528.00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	7,379,744,052.00
Ekuitas Akhir Tahun 2023	1.035.441.778,17

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

III.5. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

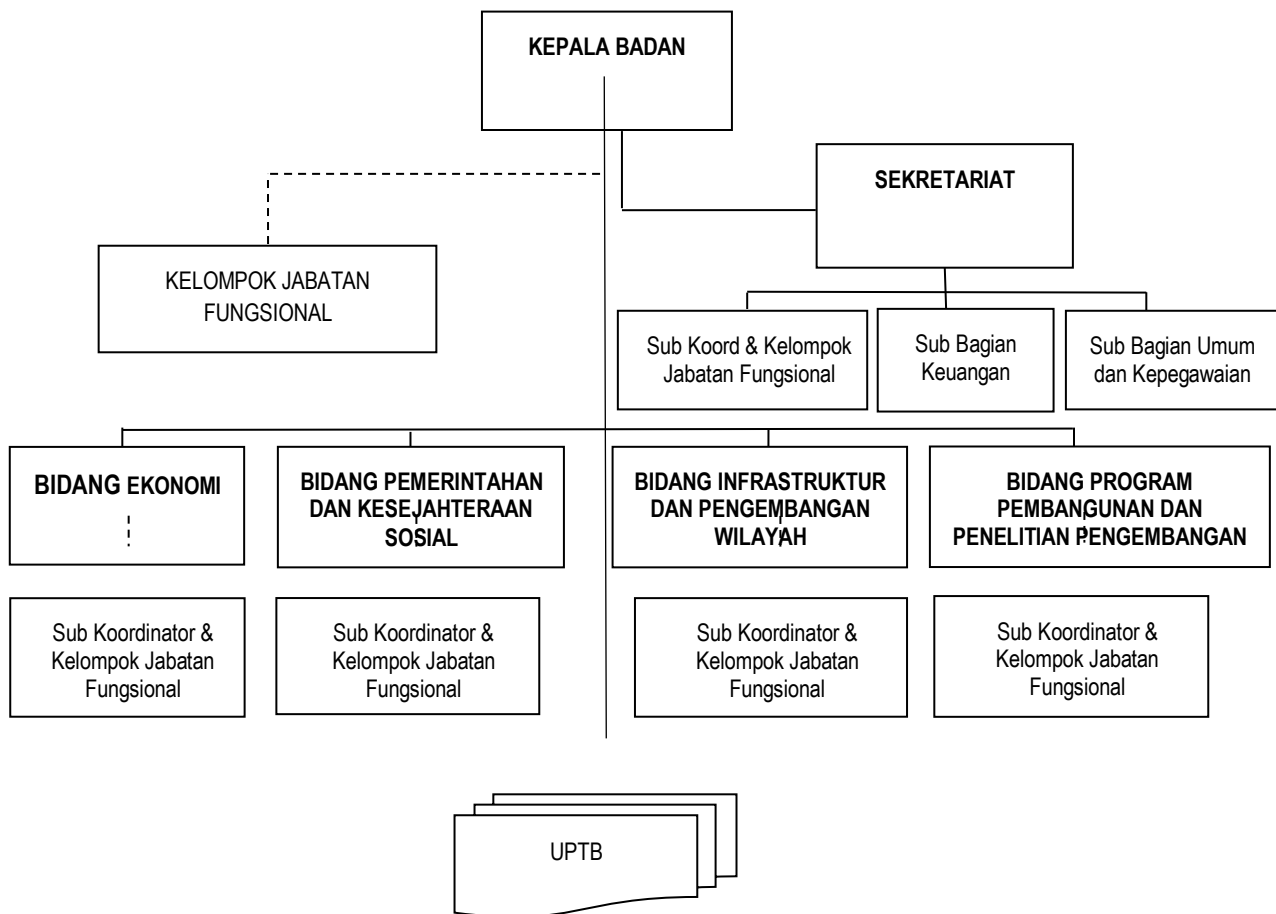
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) menyelenggarakan 2 (dua) urusan penunjang yakni Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berpedoman pada berbagai peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

III.6. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :



Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 1. Sub Koordinator Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Ekonomi
 1. Sub Koordinator Produksi
 2. Sub Koordinator Pengembangan Dunia Usaha
 3. Sub Koordinator Penanaman Modal dan Ekonomi Makro
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
 1. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 1. Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan
 2. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan
 3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - f. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
 1. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan
 2. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program
 3. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan
 - g. UPTB
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- **Tugas Pokok dan Fungsi**
- 1) Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAPPELITBANGDA;
- f. Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan BAPPELITBANGDA serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi dan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BAPPELITBANGDA;;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA sesuai dengan fungsinya.

2.1. Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan BAPPELITBANGDA.

2.2. Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian.

3) Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dunia usaha;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Sub Koordinator Produksi.

Sub Koordinator Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

3.2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

3.3. Sub Koordinator Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro.

Sub Koordinator Penanaman Modal dan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro.

4) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan

- Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4.2. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, serta Kepemudaan dan Olahraga.
 - 4.3. Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan perhubungan;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5.1. Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan.
Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
 - 5.2. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Pekerjaan Umum dan perhubungan.
 - 5.3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Persandian, Komunikasi dan Informasi.
- 6) Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program Pembangunan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi program;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan.

Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program Pembangunan, penelitian dan pengembangan.

6.2. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program.

Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program Pembangunan, penelitian dan pengembangan.

6.3. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan.

Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program Pembangunan, penelitian dan pengembangan.

III.7. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya, pada tahun 2023 BAPPELITBANGDA memiliki sumber daya aparatur sebanyak 29 orang PNS yang terbagi sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| a. Kepala | : 1 orang |
| b. Sekretariat | : 7 orang |
| c. Bidang Ekonomi | : 4 orang |
| d. Bidang Pemerintahan dan Kesra | : 6 orang |
| e. Bidang Infarstruktur dan Pengembangan Wilayah | : 4 orang |
| f. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian | : 7 orang |

Jumlah pegawai sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel XXXII
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				P3K	PTT	Total (Orang)
		I	II	III	IV			
1	Kepala				1			1
2	Sekretariat	-	1	5	1		7	14
3	PemKessos	-	-	5	1		2	8
4	Ekonomi	-	1	2	1		1	5
5	IPW	-	-	3	1		3	7
6	PPL	-	1	4	1	1	1	8
Jumlah (Orang)		-	3	19	6	1	14	43

Tabel XXXIII
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Pendidikan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN					Total (Orang)
		SD/SMP	SMA	D3	S1/D4	S2	
1	Kepala					1	1
2	Sekretariat	3	1	1	7	2	14
3	PemKessos	-	1	-	2	5	8
4	Ekonomi	-	1	-	3	1	5
5	IPW	-	-	1	5	1	7
6	PPL	-	-	-	5	3	8
Jumlah (Orang)		3	3	2	22	13	43

Dari sisi latar belakang pendidikan, sumber daya aparatur Bappelitbangda ASN yang berjumlah 28 orang dan PTT berjumlah 15 orang tersebut cukup beragam. Sebagian besar yaitu sebanyak 22 orang berpendidikan sarjana, berpendidikan pasca sarjana sebanyak 13 orang, berpendidikan D3 sebanyak 2 Orang, berpendidikan SMA sebanyak 3 orang, berpendidikan SMP sebanyak 2 orang dan yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang semuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 0,00
- b. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.379.744.052,00 atau mencapai 94,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.823.588.000,00
- c. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.170.404.575,17
- d. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 134.962.797
- e. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.035.441.778,17
- f. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00
- g. Beban – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.775.855.097
- h. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0
- i. Defisit-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.498.169.315,72

Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 juga tidak lepas dari hasil kerja keras dan kebersamaan yang terjalin antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

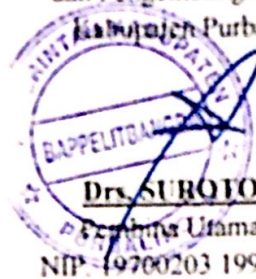
Demikian Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan baik. Dengan Laporan Keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD Tahun 2023. dan juga Kekayaan Daerah yang dikelola selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang

Selanjutnya laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara lengkap selain pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

Purbalingga, 31 Desember 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Purbalingga



Drs. SUROTO, M.Si

Pengantar Utama Muda

NIP. 19700203 199001 1 003